



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA**

TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025-2029 ini dapat disusun dengan baik.

Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025-2029 merupakan pedoman arah pembangunan untuk meraih keberhasilan di masa mendatang dan merupakan manifestasi dari respon Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda terhadap kondisi lingkungannya baik internal maupun eksternal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta analisis yang efektif. Renstra ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dalam mencapai target dan sasaran kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Samarinda.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025-2029 ini. Masukan maupun kritik yang bersifat membangun untuk penyempurnaan Renstra ini sangat kami harapkan. Semoga kita dapat menjalin kebersamaan serta saling bahu membahu mengaplikasikan program kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

Kepala
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
Kota Samarinda



Jusmarandiana Alus, SH, M.Si.

Rektor Utama Muda (IV/c)

NIP. 19711030 199403 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	13
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.....	13
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.....	13
2.1.2 Sumber Daya.....	28
2.1.3 Kinerja Pelayanan.....	29
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	35
2.1.5 Mitra Dalam Pemberian Layanan.....	35
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.....	37
2.2.1 Permasalahan.....	37
2.2.2 Isu Strategis.....	39
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025-2029.....	44
3.2 Strategi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025-2029.....	47
3.3 Arah Kebijakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025-2029.....	49
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54



4.1	Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta Pendanaan	.54
4.2	Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	119
4.3	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	123
4.4	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	125
BAB V PENUTUP		127



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Pegawai menurut Jabatan dan Pendidikan Terakhir	28
Tabel 2. 2 Data Pegawai menurut Jabatan, Golongan/Pangkat dan Pendidikan Pelatihan Struktural.....	29
Tabel 2. 3 Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Tahun 2021-2024	30
Tabel 2. 4 Usaha Kecil Menengah Tahun 2021-2024	30
Tabel 2. 5 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Samarinda Tahun 2021-2024.....	31
Tabel 2. 6 Produk Unggulan Industri Kota Samarinda Berdasarkan Kecamatan.....	31
Tabel 2. 7 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda	33
Tabel 2. 8 Target dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda	34
Tabel 2. 9 Pemetaan Permasalahan dalam Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	38
Tabel 2. 10 Matriks Isu Strategis	42
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda	46
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda	48
Tabel 3. 3 Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda	52
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda	55
Tabel 4. 2 Program Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.....	89
Tabel 4. 3 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda	91
Tabel 4. 4 Daftar Program Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	119
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama	124
Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci	125



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda	15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun, yang mengacu



pada tugas pokok dan fungsinya. Rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program yang selanjutnya diuraikan ke dalam rencana tindakan.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Dalam penyusunannya, Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 *Quick Wins* yang dirancang oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029 serta visi, misi, dan program kepala daerah. Walikota dan Wakil Walikota Samarinda mengusung visi jangka menengah periode 2025-2030 yakni: "Samarinda Maju, Kaltim Maju (Mandiri, Adil, ber-Jaya, Unggul)".

Isi Pembangunan yang terkait erat dengan urusan yang diampu oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda terdapat pada Misi Kedua yaitu "Mewujudkan Ekonomi Samarinda yang Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan". Misi kedua tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan dengan sasaran meningkatnya peran sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi serta terkendalinya kemiskinan dan pengangguran.

Dalam hal ini, Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berkesinambungan.



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12



- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 6781);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Konkuran Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 3) sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 47);

36. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 46);
37. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);
38. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 298);
39. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 050-05/386/HK-KS/III/2022 tentang Perubahan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 050-05/177/HK-KS/XI/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda adalah sebagai pedoman umum dan arah kebijakan dalam pembangunan bidang koperasi, UKM dan perindustrian lima tahun kedepan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan program prioritas serta indikatif pendanaan bagi penyelenggara



pemerintah dan pelaksana pembangunan di Kota Samarinda khususnya sektor Koperasi, UKM dan Perindustrian.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda;
2. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda;
3. Sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025-2029 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I Pendahuluan memuat:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA

Pada Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda memuat:

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda memuat:

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda;

2.1.2 Sumber Daya;

2.1.3 Kinerja Pelayanan;

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan; dan

2.1.5 Mitra Dalam Pemberian Layanan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda memuat:

2.2.1 Identifikasi Permasalahan;

2.2.2 Perumusan Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan memuat:

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

3.2 Strategi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025-2029; dan

3.3 Arah Kebijakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025-2029.



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan memuat:

- 4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif;
- 4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- 4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

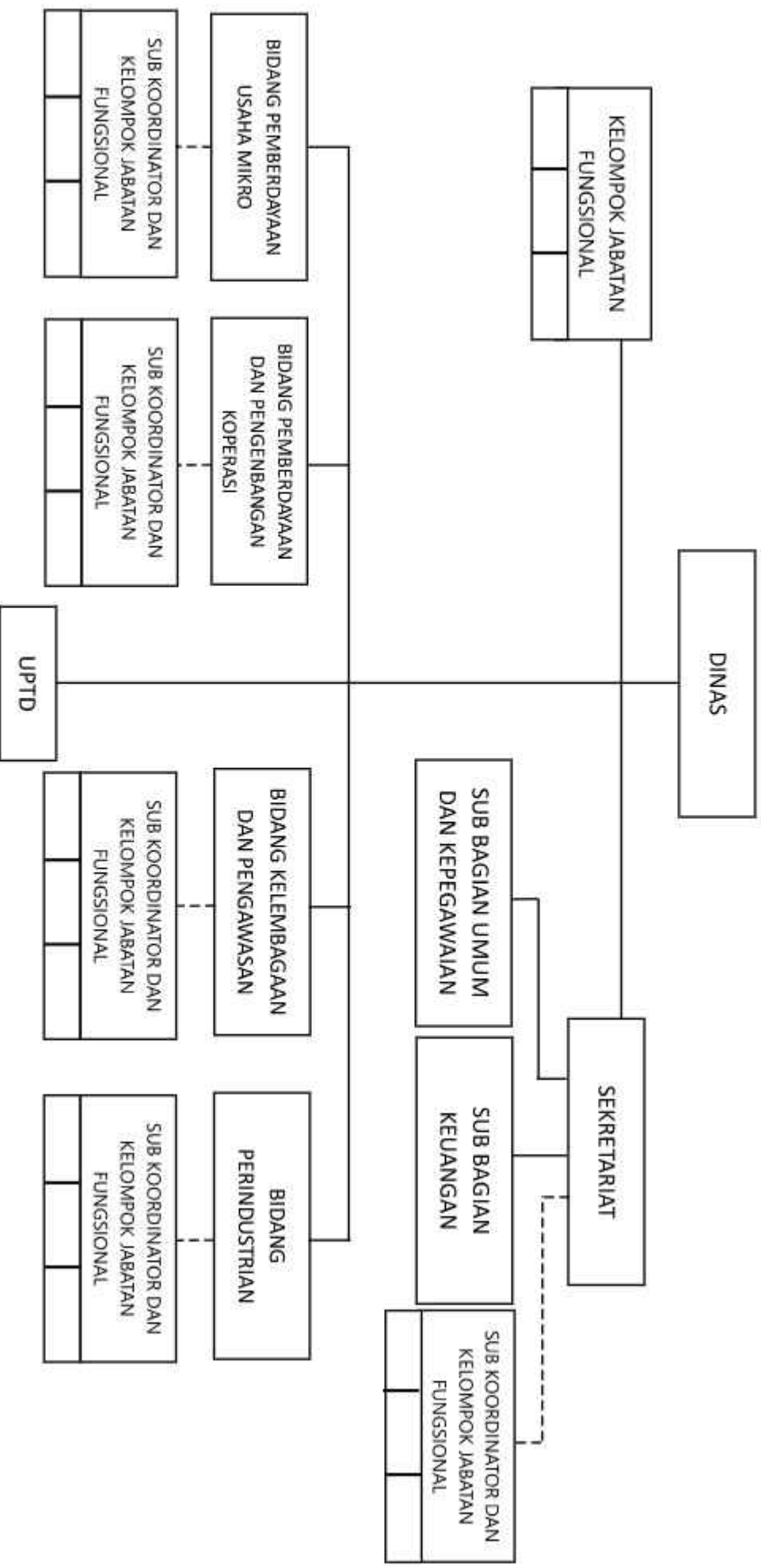
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

Berdasarkan peraturan Walikota Samarinda Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda, menjelaskan bahwa susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda adalah sebagai berikut.

1. Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Perindustrian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. UPTD.



Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda



Berikut uraian tugas pokok dan fungsi berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda.

1. Dinas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Kelembagaan dan Pengawasan, serta Bidang Perindustrian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut.

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumberdaya, sarana prasarana dan promosi koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumberdaya, sarana prasarana dan promosi koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
- c. Pelaksanaan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumberdaya, sarana prasarana dan promosi koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumberdaya, sarana prasarana dan promosi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan perindustrian;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada sekretaris. Adapun tugas dari Sekretariat adalah melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut.

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
- c. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- d. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- f. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- g. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- h. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- i. Pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi;
- j. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- k. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- l. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;



- m. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- n. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- o. Pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
- p. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- q. Pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
- r. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- t. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud, memiliki tugas sebagai berikut.

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
- c. Melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- d. Memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;



- e. Melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian;
- f. Mengkoordinir dan menyusun bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat;
- g. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
- h. Melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
- i. Menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
- j. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud, memiliki tugas sebagai berikut.

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- c. Melaksanakan verifikasi kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS



serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan dinas;
- e. Melaksanakan penyiapan surat perintah membayar (SPM);
- f. Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
- g. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- h. Menyusun neraca keuangan dinas;
- i. Mengkoordinir dan menyusun anggaran dinas;
- j. Menyusun laporan keuangan dinas;
- k. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang. Adapun tugas dari Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan usaha mikro dengan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan, fasilitasi,



pengembangan, monitoring dan evaluasi usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil, yang diarahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kebijakan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro melaksanakan fungsi sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Penyusunan pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- c. Pelaksanaan pendataan, pengolahan, analisa pelaku dan potensi usaha mikro;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro dan kewirausahaan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro;
- h. Pelaksanaan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, SDM, desain, teknologi;
- i. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
- j. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan kewirausahaan dan jaringan pasar usaha mikro;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- l. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan



m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang. Adapun tugas dari Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dengan menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan pemberdayaan koperasi, perluasan akses pembiayaan/permodalan, promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional, koordinasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi, kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya, pelaksanaan Pendidikan dan Latihan bagi perangkat organisasi koperasi serta pelaksanaan perlindungan koperasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi melaksanakan fungsi sebagai berikut.

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan dan pengembangan, meliputi peningkatan pemahaman, pendidikan, pelatihan dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM/perangkat organisasi Koperasi;



- c. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Pemerintah Kota Samarinda;
- d. Penyusunan dan pelaksanaan konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- e. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
- f. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- g. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- h. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan koperasi di Kota;
- j. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang. Adapun tugas dari Bidang Kelembagaan dan Pengawasan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di



bidang kelembagaan dan pengawasan dengan menyelenggarakan kegiatan pendataan dan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, koordinasi dan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi, pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas, pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi, bimbingan dan penyuluhan, pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota, pelaksanaan penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi, penyediaan data Kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan melaksanakan fungsi sebagai berikut.

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Pelaksanaan pendataan, verifikasi dan analisa data jumlah koperasi, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
- c. Pelaksanaan analisa dokumen permohonan izin dan fasilitasi pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Samarinda;
- d. Pelaksanaan analisa berkas pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi;



- e. Pelaksanaan pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Pemerintah Kota Samarinda;
- f. Pelaksanaan penyuluhan perkoperasian;
- g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan bimbingan teknis perkoperasian;
- h. Pembuatan laporan tahunan koperasi;
- i. Penyusunan perencanaan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat dan pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Usaha Simpan Pinjam Koperasi kewenangan Pemerintah Kota Samarinda;
- j. Pelaksanaan penyusunan dan analisa data penilaian Kesehatan dan pemberian penghargaan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Usaha Simpan Pinjam Koperasi kewenangan Pemerintah Kota Samarinda;
- k. Pelaksanaan analisa penerapan peraturan dan perundang-undangan;
- l. Pelaksanaan analisa penerapan sanksi bagi koperasi;
- m. Penyusunan perencanaan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- n. Penyusunan perencanaan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
- o. Penyusunan perencanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
- p. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang kelembagaan dan pengawasan;
- r. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan



s. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

l. Bidang Perindustrian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Bidang Perindustrian membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang. Adapun tugas dari Bidang Perindustrian adalah melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pengelolaan energi baru terbarukan, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri; Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perindustrian melaksanakan fungsi sebagai berikut.

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pengelolaan energi baru terbarukan melalui penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah , sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- c. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pengelolaan energi baru terbarukan melalui penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah , sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;



- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pengelolaan energi baru terbarukan melalui penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah , sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- e. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya; Jumlah dari Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Lalu untuk Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing. Subkoordinator ditunjuk atau ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan, dan pembagian tugas lebih lanjut ditetapkan oleh Wali Kota. Adapun tugas dari subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional adalah melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan



evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

n. UPTD.

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas; Pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. UPTD terdiri atas 2 (dua) klasifikasi sebagai berikut.

- a. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional; dan
- b. UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

2.1.2 Sumber Daya

A. Sumber Daya Manusia

Pada Bulan Juli Tahun 2025 pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda sebanyak 92 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Data Pegawai menurut Jabatan dan Pendidikan Terakhir

Nama Jabatan	Pendidikan Terakhir								Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Fungsional Penyetaraan	-	-	-	-	-	-	10	4	14
JFU/Staf PNS	1	-	17	-	-	1	18	1	38
JFT	-	-	-	-	-	2	1	-	3
PPPK	-	-	7	-	-	-	1	-	8
PTTB	-	-	1	-	-	1	5	2	9
PTTH	1	-	9	-	-	-	5	-	15



Nama Jabatan	Pendidikan Terakhir								Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	
Total	2	0	34	0	0	4	42	10	92

Jika dilihat dari golongan/pangkat serta pendidikan pelatihan struktural, berikut rinciannya:

Tabel 2. 2 Data Pegawai menurut Jabatan, Golongan/Pangkat dan Pendidikan Pelatihan Struktural

Nama Jabatan	Golongan/Pangkat				Pendidikan Pelatihan Struktural			
	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 2	-	-	-	1	-	1	-	-
Eselon 3	-	-	-	2	-	-	1	1
Eselon 4	-	-	2	-	-	-	-	2
Fungsional Penyetaraan	-	-	12	2	-	-	2	7
JFU/Staf PNS	1	9	27	1	-	-	-	-
JFT	-	-	3	-	-	-	-	-
PPPK	-	-	-	-	-	-	-	-
PTTB	-	-	-	-	-	-	-	-
PTTH	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1	9	44	6	0	1	3	10

B. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa kendaraan dinas, komputer, laptop, barang inventaris, dan fasilitas kantor lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik, dan diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

2.1.3 Kinerja Pelayanan

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda selama periode 2021-2026 telah melaksanakan fungsi pelayanan



urusan koperasi, UKM dan perindustrian Kota Samarinda sebagai berikut:

A. SEKTOR KOPERASI DAN UKM

Terkait sektor pemberdayaan koperasi dan UKM, jumlah koperasi aktif tetap 993 unit selama empat tahun berturut-turut (2021-2024). Ini menunjukkan tidak ada pertumbuhan koperasi aktif, meskipun total jumlah koperasi meningkat setiap tahun. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa tidak ada koperasi baru yang benar-benar aktif atau bahwa koperasi yang sebelumnya aktif mengalami stagnasi dalam statusnya.

Tabel 2. 3 Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Tahun 2021-2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah koperasi aktif	993	993	993	993
2.	Jumlah koperasi tidak aktif	336	348	362	374
3.	Persentase koperasi aktif	74,71	74,04	73,28	72,64
	Jumlah Koperasi	1.329	1.341	1.355	1.367

Sedangkan, jumlah UKM meningkat signifikan dari 41.389 (2021) menjadi 46.287 (2024), atau tumbuh sekitar 11,8% dalam 4 tahun. Ini menandakan bahwa iklim usaha mikro dan kecil cukup berkembang.

Tabel 2. 4 Usaha Kecil Menengah Tahun 2021-2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah seluruh UKM	41.389	43.431	45.012	46.287

B. SEKTOR PERINDUSTRIAN

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Samarinda, selama periode 2021 hingga 2024, menunjukkan tren pertumbuhan positif, meningkat dari Rp71.170,55 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp98.414,87 miliar pada tahun 2024. Sektor industri juga mengalami peningkatan nilai, dari Rp5.314,78 miliar menjadi Rp6.776,28 miliar dalam periode yang sama.



Namun, kontribusi sektor industri terhadap total PDRB justru mengalami penurunan, dari 7,47% pada tahun 2021 menjadi 6,88% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor industri tumbuh secara absolut, laju pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya dalam struktur ekonomi Kota Samarinda. Penurunan kontribusi ini dapat menjadi indikator perlunya penguatan sektor industri agar mampu bersaing dan berperan lebih besar dalam perekonomian daerah

Tabel 2. 5 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Samarinda Tahun 2021-2024

No	Tahun	PDRB Kota Samarinda (Miliar Rp)	PDRB Sektor Industri (Miliar Rp)	Kontribusi Sektor Industri (%)	Laju Pertumbuhan (%)
1.	2021	71.170,55	5.314,78	7,47	0,11
2.	2022	83.353,69	5.768,46	6,92	0,37
3.	2023	89.289,45	6.101,95	6,84	0,22
4.	2024	98.414,87	6.776,28	6,88	0,47

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2025

Saat ini di semua kecamatan di Kota Samarinda mempunyai industri produk unggulan, baik industri yang berskala besar maupun industri kecil menengah. Industri produk unggulan di Kota Samarinda berdasarkan kecamatan terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 6 Produk Unggulan Industri Kota Samarinda Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Produk Unggulan
1	Sungai Kunjang	Kayu lapis/ Plywood/ Industri Pengolahan Kayu, Sawmil, Industri Kapal Besi/Baja, Moulding, Industri Las dan Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua / Empat, Ready Mix, Industri Makanan dan Minuman, Percetakan Umum, Kerajinan ukir kayu.
2	Samarinda Ulu	Moulding, Industri Las dan Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua / Empat, Industri Makanan dan Minuman, Percetakan Umum.
3	Samarinda Kota	Industri Las dan Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua/ Empat, Industri Makanan dan Minuman; Industri Pandai Besi, Percetakan Umum.
4	Samarinda Ilir	Industri Las dan Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua I Empat, Industri Makanan dan Minuman, Industri Kapal kayu, Percetakan Umum.



5	Sambutan	Industri Kapal Besi/Baja, Industri Pengolahan Kayu, Sawmil, Moulding, Industri Las dan Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua I Empat, Ready Mix, Industri Makanan dan Minuman, Industri Pembuatan Busa.
6	Sungai Pinang	Industri Las dan Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua I Empat, Industri Makanan dan Minuman, Percetakan Umum.
7	Samarinda Utara	Industri Pengolahan Kayu, Sawmil, Moulding, Industri Las dan Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua I Empat, Ready Mix, Industri Makanan dan Minuman, Percetakan Umum, industry kerajinan anyaman rotan/manik.
8	Loa Janan Ilir	Industri Pengolahan Kayu, Sawmil, Moulding, Industri Las dan Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua I Empat, Ready Mix, Industri Makanan dan Minuman.
9	Samarinda Seberang	Industri Kain Sarung Tenun Samarinda, Industri Pengolahan Kayu, Sawmil, Moulding, Industri Las dan Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua/ Empat, Ready Mix, Industri Makanan dan Minuman.
10	Palaran	Industri Kapal/perahu Besi/Baja, Industri Pengolahan Kayu, Sawmil, Industri Kapal Besi/Baja, Moulding, Industri Las dan Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua I Empat, Ready Mix, Industri Makanan dan Minuman, Pengantongan Semen, Industri Pupuk, Bata Ringan.



Tabel 2. 7 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Peningkatan Koperasi Sehat	12	13	14	15	12	13	14	15	100	100	100	100
2	Peningkatan Pelaku Kewirausahaan	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.042	1.581	2.489	100	102	79,05	124
3	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	8,00	8,10	8,20	7,48	7,75	7,47	6,83	6,83	96,88	92,22	83,29	91,31



Tabel 2. 8 Target dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

No	Uraian	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Anggaran	25.114.231. 181	18.124.349. 311	19.362.261. 600	22.393.147. 913	19.449.143. 455	15.574.481. 697	17.289.690. 305	21.316.538. 917	77,44	85,93	89,30	95,19



2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka menjamin terselenggaranya layanan publik yang efektif, efisien, dan terkoordinasi dalam urusan koperasi, UKM dan perindustrian, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menetapkan sejumlah kelompok sasaran layanan dengan berbagai pemangku kepentingan non-pemerintah. Keberadaan kelompok sasaran layanan ini memiliki peran penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan, baik sebagai pelaksana langsung, fasilitator, maupun sebagai penerima manfaat yang turut mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kelompok sasaran layanan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda antara lain:

1. Pelaku Usaha Koperasi, UKM dan Perindustrian, Sebagai penerima layanan, pelaku usaha juga turut terlibat aktif dalam pengembangan produk, pelatihan, dan peningkatan kapasitas usaha.
2. Asosiasi dan Organisasi Usaha, berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan pelaku usaha.
3. Lembaga Keuangan dan Perbankan, memberikan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM dan koperasi.

2.1.5 Mitra Dalam Pemberian Layanan

Dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik dalam bidang koperasi, UKM dan perindustrian, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan. Keberadaan mitra layanan ini memiliki peran penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Beberapa mitra kerja ini mencakup instansi pemerintah daerah, lembaga vertikal, serta pemangku kepentingan strategis lainnya yang berperan penting dalam mendukung koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi lintas sektor. Mitra utama Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota



Samarinda guna koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara lain
guna koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara lain antara lain:

1. Kementerian Koperasi dan UKM.
2. Kementerian Perindustrian.
3. Aparat Penegak Hukum, dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran.
4. Sekretariat Daerah, sebagai koordinator umum pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), dalam perencanaan, integrasi program, dan penganggaran.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dalam penguatan kapasitas aparatur dan pemenuhan SDM teknis.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran.
8. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, dalam dukungan kolaborasi antar sektor.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dalam dukungan infrastruktur.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dalam fasilitasi investasi di sektor koperasi, UKM dan perindustrian.
11. Dinas Perdagangan, dalam fasilitasi kegiatan perdagangan, pasar dan distribusi barang.
12. Satpol PP, dalam fasilitasi penegakan peraturan daerah.
13. Kecamatan dan Kelurahan, dalam fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan ekonomi masyarakat.



2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

2.2.1 Permasalahan

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda memiliki tanggung jawab strategis dalam mengakselerasi pengembangan sektor ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi, pemberdayaan usaha mikro, dan industrialisasi berbasis lokal. Namun dalam pelaksanaan fungsi tersebut, masih terdapat sejumlah kendala sistemik yang menghambat efektivitas intervensi kebijakan dan pencapaian target pembangunan daerah.

Pertama, pengembangan koperasi, usaha mikro, dan sektor industri belum berlangsung optimal. Hal ini terlihat dari stagnasi jumlah koperasi aktif, belum masifnya transformasi koperasi menjadi unit produktif yang modern, dan terbatasnya skala usaha mikro yang naik kelas. Kedua, penyediaan sarana prasarana, media promosi, dan ruang pemasaran produk belum mendukung secara komprehensif. Pelaku usaha kecil masih mengalami kesulitan dalam mengakses lokasi strategis untuk promosi maupun fasilitas produksi yang memadai, sehingga daya jangkau produk lokal ke pasar domestik pun terbatas.

Ketiga, rendahnya daya saing produk unggulan daerah menjadi tantangan tersendiri. Minimnya inovasi, keterbatasan akses terhadap teknologi produksi, dan belum optimalnya proses sertifikasi menyebabkan produk lokal kalah bersaing dengan barang luar daerah maupun impor. Kondisi ini diperparah oleh belum intensifnya fasilitasi branding, legalitas usaha, dan akses pasar digital. Keempat, tersendatnya penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menghambat pelaksanaan sejumlah program strategis di sektor industri. Keterbatasan fiskal ini berdampak langsung pada



penurunan kapasitas implementasi kegiatan dan keterbatasan stimulus pembangunan sentra industri kecil menengah.

Keempat permasalahan di atas menjadi dasar dalam perumusan isu strategis, arah kebijakan, dan prioritas program Renstra. Diperlukan transformasi sistem tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis data agar pencapaian sasaran pembangunan sektor koperasi, usaha mikro, dan industri dapat diwujudkan secara optimal, inklusif, dan berkelanjutan. Berdasarkan peran dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

Tabel 2. 9 Pemetaan Permasalahan dalam Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya Pengembangan Koperasi, UMKM, dan Industri	Koperasi stagnan, UMKM belum banyak yang naik kelas, sektor industri lokal belum kompetitif	Kelembagaan koperasi belum adaptif Minimnya inkubasi bisnis UMKM Rendahnya transformasi digital dan manajerial Skala industri belum berkembang
2	Keterbatasan Sarana dan Prasarana Usaha	Minimnya fasilitas promosi, ruang produksi, dan tempat usaha publik	Infrastruktur belum terencana secara integratif Belum optimalnya pemanfaatan ruang publik untuk promosi Keterbatasan dana dan kemitraan sektor usaha
3	Rendahnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah	Produk lokal sulit menembus pasar nasional dan global	Minim inovasi desain dan teknologi Kurang akses terhadap sertifikasi (SNI, halal, BPOM)



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			Rendahnya branding dan digital marketing produk
4	Terhambatnya Akses Dana Alokasi Khusus (DAK)	Program industri daerah tidak dapat diakselerasi sesuai kebutuhan	Keterbatasan fiskal dan kelengkapan usulan teknis Persaingan alokasi dana pusat Belum optimalnya koordinasi lintas instansi dan kementerian

2.2.2 Isu Strategis

Dengan menganalisa permasalahan yang ada disandingkan dengan hasil telaah terhadap Rencana Strategis, maka diperoleh gambaran isu strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda sebagai berikut:

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda memiliki peran strategis dalam mengembangkan sektor koperasi dan industri, serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha melalui berbagai kebijakan dan program. Sebagai entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan UMKM, dinas ini tidak hanya merumuskan kebijakan, tetapi juga mengawasi implementasi serta efektivitas tata kelola pemerintahan di bidang ekonomi lokal. Dengan pendekatan berbasis data dan analisis empiris, dinas ini berupaya memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberikan dampak positif bagi perkembangan sektor ekonomi di Kota Samarinda.

Berdasarkan kajian terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda, Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, serta evaluasi kinerja sebelumnya, sejumlah isu strategis telah diidentifikasi sebagai tantangan utama yang perlu mendapatkan



perhatian serius. Analisis terhadap pelaksanaan program dan pencapaian target sebelumnya menunjukkan adanya sejumlah kendala yang memerlukan langkah mitigasi dan optimalisasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas serta keberlanjutan pembangunan sektor koperasi dan industri di Kota Samarinda, antara lain:

1. Akses Pembiayaan untuk UMKM: Meskipun telah ada program bantuan modal, banyak pelaku usaha kecil yang masih kesulitan dalam mengakses pembiayaan yang terjangkau dan sesuai kebutuhan.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Pelatihan yang diberikan belum sepenuhnya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha, sehingga dampaknya terhadap produktivitas masih terbatas.
3. Inovasi dan Diversifikasi Produk: Banyak UMKM yang belum mampu berinovasi dan mendiversifikasi produk, sehingga daya saing di pasar lokal dan nasional masih rendah.
4. Pemasaran dan Distribusi Produk: Keterbatasan akses pasar dan kurangnya strategi pemasaran yang efektif mengakibatkan produk UMKM sulit bersaing dengan produk dari luar daerah.
5. Pengembangan Infrastruktur Pendukung: Infrastruktur yang kurang memadai, seperti fasilitas produksi dan tempat pemasaran, menghambat pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil.
6. Sertifikasi dan Standarisasi Produk: Banyak produk UMKM yang belum memiliki sertifikasi yang diperlukan, sehingga mengurangi kepercayaan konsumen dan daya saing produk.
7. Keterlibatan dalam Jaringan Bisnis: Kurangnya jaringan dan kolaborasi antara pelaku usaha mengakibatkan minimnya dukungan dan sinergi dalam pengembangan usaha.



8. Kesadaran akan Pentingnya Teknologi: Pelaku usaha masih banyak yang menggunakan metode tradisional dan belum memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha.

Berdasarkan kajian terhadap dokumen turunan RPJMD Kota Samarinda serta Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, telah diidentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi prioritas utama bagi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dalam periode mendatang.



Tabel 2. 10 Matriks Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas	Permasalahan Dinas	Isu KLHS relevan dengan Dinas	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertumbuhan UMKM lokal	Akses pembiayaan rendah	Ketimpangan ekonomi lokal	Kesenjangan akses keuangan UMKM	Literasi keuangan masih rendah	Dukungan BUMD belum optimal	Keterbatasan akses pembiayaan untuk UMKM
Potensi pelaku usaha produktif	Rendahnya kualitas SDM	Ketidaksetaraan akses pendidikan dan pelatihan	Kebutuhan reskilling tenaga kerja	Kualitas pelatihan belum merata	Keterbatasan lembaga vokasi	Pelatihan belum berdampak signifikan terhadap produktivitas
Produk lokal khas daerah	Minim inovasi dan diversifikasi produk	Ketergantungan pada komoditas tertentu	Transformasi industri kreatif	Kurangnya dorongan inovasi di UMKM	Orientasi pasar lokal sempit	Rendahnya inovasi dan daya saing produk UMKM
Jaringan pemasaran domestik	Akses pasar dan strategi promosi lemah	Kesenjangan akses pasar	Globalisasi produk dan digital marketing	Akses pasar UMKM belum inklusif	Persaingan produk luar daerah	Terbatasnya kanal distribusi dan branding
Kawasan potensial Industri kecil	Minimnya infrastruktur	Kesenjangan infrastruktur ekonomi	Urbanisasi dan tekanan infrastruktur	Pembangunan belum merata	Sarana pendukung usaha terbatas	Infrastruktur produksi dan pemasaran belum memadai



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas	Permasalahan Dinas	Isu KLHS relevan dengan Dinas	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Produk UMKM berpotensi ekspor	Minimnya sertifikasi dan standar	Keamanan dan mutu produk	Sertifikasi berbasis keberlanjutan	Regulasi teknis masih kompleks	Layanan sertifikasi terbatas	Sertifikasi dan legalitas produk rendah
Komunitas usaha lokal	Minimnya jejaring dan kolaborasi	Kemandirian ekonomi lokal	Ekosistem kolaboratif ekonomi	Kelembagaan UMKM belum kuat	Kolaborasi pelaku ekonomi masih lemah	Keterlibatan UMKM dalam jaringan bisnis masih rendah
Potensi adaptasi digital	Rendahnya pemanfaatan teknologi	Ketimpangan teknologi	Transformasi digital global	Strategi digitalisasi belum merata	Infrastruktur digital masih terbatas	Rendahnya kesadaran dan adopsi teknologi



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025-2029

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Perindustrian Kota Samarinda memiliki peran krusial dalam mendorong pengembangan subsektor koperasi dan industri yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda berkomitmen untuk memperkuat kontribusi sektor koperasi dan industri terhadap perekonomian lokal serta mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan berbasis inovasi.

Berdasarkan RPJMD Kota Samarinda 2025-2029, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda berperan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memperkuat jaringan pemasaran, serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Sasaran utama dalam periode ini mencakup peningkatan kualitas dan nilai tambah produk UMKM, pengembangan kapasitas pelaku usaha, serta perbaikan infrastruktur pendukung guna menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

Sejalan dengan **Visi Kota Samarinda "Samarinda Maju untuk Kaltim Maju"** serta **Misi ke 2 Kota Samarinda: Mewujudkan Ekonomi Samarinda Yang Inklusif, Mandiri, Dan Berkelanjutan**, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda



menetapkan tujuan pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, yaitu: **"Meningkatnya Peran Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi."** Adapun sasaran strategis yang ditetapkan dalam periode ini meliputi:

1. **Memberdayakan dan Mengembangkan Koperasi**, melalui peningkatan akses terhadap pembiayaan, pelatihan, dan fasilitasi pemasaran.
2. **Memberdayakan dan Mengembangkan UMKM**, melalui peningkatan akses terhadap pembiayaan, pelatihan, dan fasilitasi pemasaran.
3. **Meningkatnya Pembangunan Industri**, dengan mendorong investasi, inovasi teknologi, serta penguatan daya saing industri lokal.

Sasaran strategis ini disusun dengan pendekatan berbasis data dan analisis kinerja guna memastikan implementasi program yang terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Penyusunan sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda 2025-2029, serta didasarkan pada evaluasi permasalahan, tugas, dan fungsi perangkat daerah guna memastikan efektivitas kebijakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam merumuskan sasaran ini, dilakukan dengan memperhatikan program-program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda sesuai dengan yang tertuang dalam **RPJMD Kota Samarinda 2025-2029**, serta berdasarkan rumusan permasalahan, tugas, dan fungsi perangkat daerah. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut:



3.2 Strategi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025-2029

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda didasarkan pada Visi RPJMD Kota Samarinda 2025-2029, yaitu **"SAMARINDA MAJU, KALTIM MAJU (Mandiri, Adil, Berjaya, Unggul)"**. Visi ini menekankan pentingnya pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan serta penguatan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan progresif. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda berkomitmen untuk meningkatkan peran sektor koperasi, usaha kecil menengah, dan industri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis inovasi dan daya saing lokal. Dengan pendekatan yang strategis, penguatan kapasitas pelaku usaha serta optimalisasi kebijakan ekonomi menjadi elemen utama dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan bisnis di Kota Samarinda.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025-2029, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang selaras dengan **Misi 2 Pemerintah Kota Samarinda, yaitu "Mewujudkan Ekonomi Samarinda Yang Inklusif, Mandiri, Dan Berkelanjutan"**. Strategi yang diterapkan mencakup peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, pemanfaatan teknologi digital untuk optimalisasi pemasaran produk lokal, serta pengembangan ekosistem industri yang berbasis kearifan lokal dan keberlanjutan. Selain itu, penguatan sistem evaluasi kinerja dan efektivitas regulasi menjadi aspek penting dalam memastikan kebijakan ekonomi daerah dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global yang semakin dinamis.



Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
Kota Samarinda

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mendorong peningkatan kapasitas SDM UMKM melalui pelatihan vokasional berbasis kompetensi, dukungan inkubasi bisnis, dan pemberdayaan koperasi sektor produktif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.	Membangun ekosistem inovasi dan akses pembiayaan inklusif melalui fasilitasi diversifikasi produk unggulan, penguatan pembiayaan mikro, serta perluasan jejaring pelaku usaha dengan lembaga keuangan dan inkubator bisnis.	Mendorong transformasi digital UMKM dengan membangun sistem pemasaran digital, pengembangan <i>e-commerce</i> lokal, peningkatan literasi digital, serta perluasan akses sertifikasi dan standarisasi mutu produk daerah.	Mengintegrasikan pelaku usaha dalam rantai pasok industri, memperkuat kolaborasi lintas sektor, membuka akses kemitraan regional dan ekspor, serta memfasilitasi sinergi antar koperasi dalam skala klaster usaha.	Mewujudkan ekosistem usaha koperasi dan UMKM yang berkelanjutan dan tangguh melalui replikasi model bisnis unggulan, penguatan kelembagaan koperasi modern, serta implementasi strategi keberlanjutan berbasis lokalitas.

Keselarasan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dengan **RPJPN 2025-2045**, **RPJPD Kota Samarinda 2025-2045**, dan **RPJMD Kota Samarinda 2025-2029** menunjukkan komitmen kuat dalam **mewujudkan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan**. Dalam hal ini, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda berperan dalam mendukung implementasi kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta penguatan sektor industri lokal. Sinkronisasi kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan program pengembangan usaha kecil dan menengah yang dapat mendorong peningkatan daya saing, inovasi, serta digitalisasi sistem pemasaran dan distribusi. Dengan pendekatan berbasis inklusi ekonomi, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem usaha yang kondusif, didukung dengan



kebijakan pembiayaan yang terjangkau, fasilitasi kemitraan strategis, serta peningkatan akses terhadap teknologi bagi pelaku usaha.

Dengan adanya harmonisasi kebijakan lintas dokumen perencanaan, diharapkan sektor koperasi dan industri di Kota Samarinda dapat berkembang lebih kompetitif dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Langkah-langkah yang diambil melalui strategi ini meliputi peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui program pelatihan dan pendampingan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal, serta penguatan tata kelola yang berbasis data dan inovasi. Selain itu, kebijakan ini juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi daerah selaras dengan agenda nasional dan daerah dalam menciptakan sistem usaha yang produktif dan adaptif terhadap dinamika pasar serta tantangan global, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

3.3 Arah Kebijakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dirumuskan berdasarkan:

- a. Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, terutama misi kedua: "*Mewujudkan Ekonomi Samarinda yang Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan*";
- b. Isu strategis prioritas yang telah diidentifikasi melalui RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- c. Perkembangan kebutuhan masyarakat pelaku usaha dan ekosistem ekonomi lokal di sektor koperasi, UKM dan perindustrian.



Kebijakan pembangunan selama periode Renstra 2025-2029 akan difokuskan melalui **tiga pilar intervensi utama** berikut:

a. Bidang Koperasi

1. Revitalisasi koperasi tidak aktif dan rasionalisasi kelembagaan untuk meningkatkan proporsi koperasi sehat dan produktif.
2. Transformasi digital koperasi sektor riil melalui adopsi sistem manajemen berbasis teknologi informasi.
3. Penguatan manajemen dan akuntabilitas koperasi melalui pelatihan tata kelola berbasis *good governance*.
4. Fasilitasi akses pembiayaan inklusif bagi koperasi melalui kemitraan dengan lembaga keuangan mikro dan program penjaminan daerah.
5. Pengembangan koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai model pemberdayaan berbasis komunitas dan inklusi ekonomi lokal.
6. Penguatan peran koperasi dalam ekosistem bisnis daerah melalui integrasi dalam rantai pasok dan kemitraan multipihak.

b. Bidang UKM

1. Peningkatan daya saing pelaku UKM melalui pelatihan vokasional dan sertifikasi kompetensi kerja berbasis potensi lokal.
2. Penyediaan ruang promosi dan tempat usaha pada infrastruktur publik seperti citra niaga dan sentra ekonomi masyarakat.
3. Fasilitasi inovasi produk dan teknologi produksi sederhana untuk mendorong diversifikasi dan nilai tambah.
4. Integrasi UKM ke dalam ekosistem digital melalui *onboarding e-commerce* lokal, pelatihan digital marketing, dan dukungan pemasaran daring.



5. Fasilitasi branding, legalitas usaha dan sertifikasi produk UKM termasuk SNI, halal, dan keamanan pangan.
 6. Penguatan jejaring kemitraan UKM dengan koperasi, dunia usaha, dan komunitas ekonomi kreatif untuk memperluas pasar dan jaringan pendukung usaha.
- c. Bidang Perindustrian
1. Pembangunan rumah produksi dan rumah kemasan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas tampilan produk industri kecil.
 2. Peningkatan fasilitas industri melalui penyediaan alat penunjang produksi dan rehabilitasi sarana prasarana yang mendukung produktivitas.
 3. Fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk IKM untuk membuka akses pasar domestik dan ekspor.
 4. Pengembangan klaster industri kecil dan menengah berbasis wilayah sesuai dengan komoditas unggulan kecamatan.
 5. Integrasi pelaku IKM ke dalam rantai pasok industri daerah dan program kemitraan antar sektor untuk menciptakan konektivitas usaha yang berkelanjutan.
 6. Penguatan sistem informasi industri daerah dan pelaporan melalui SIINas sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan sektor industri.



Tabel 3. 3 Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD SAMARINDA 2025-2029	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan kualitas kelembagaan dan tata kelola koperasi modern (Permenkop UKM No. 8 Tahun 2021)	Penguatan koperasi sebagai sokoguru ekonomi kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi koperasi tidak aktif - Digitalisasi koperasi berbasis sektor riil - Penguatan manajemen koperasi 	Urusan Koperasi
2	Pengembangan kewirausahaan melalui pelatihan berbasis SKKNI dan inkubasi (Permenkop UKM No. 2 Tahun 2022)	Tumbuhnya wirausaha baru dan UMKM tangguh berbasis lokalitas	<ul style="list-style-type: none"> - Inkubasi UMKM berbasis potensi daerah - Sertifikasi pelaku usaha - Pembentukan komunitas wirausaha 	Urusan UKM
3	Penguatan pembiayaan mikro dan sistem penjaminan koperasi dan UMKM (Permenkop UKM No. 11 Tahun 2020)	Akses pembiayaan usaha yang inklusif dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi akses KUR dan LKM - Penguatan lembaga penjaminan daerah - Literasi keuangan berbasis komunitas 	Urusan Koperasi dan UKM
4	Peningkatan kapasitas dan legalitas pelaku industri kecil (Permenperin No. 6 Tahun 2022)	Penguatan daya saing IKM berbasis komoditas unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikasi produk IKM - Pelatihan teknis produksi - Bantuan legalitas usaha industri 	Urusan Perindustrian
5	Pengembangan klaster IKM berbasis potensi lokal (Permenperin No. 5 Tahun 2022)	Pengembangan sentra industri berbasis wilayah dan konektivitas	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan komoditas dan wilayah klaster - Pembangunan sentra IKM 	Urusan Perindustrian



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD SAMARINDA 2025-2029	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			- Kemitraan antar industri skala mikro	
6	Digitalisasi pemasaran produk koperasi dan UMKM (Permendag No. 50 Tahun 2020)	Transformasi digital pelaku usaha daerah	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Onboarding</i> UMKM ke <i>e-commerce</i> - Pelatihan digital marketing - Pembentukan pasar daring lokal 	Koperasi, UKM dan Perindustrian
7	Fasilitasi hak kekayaan intelektual dan perlindungan produk daerah (UU No. 28 Tahun 2014)	Perlindungan dan peningkatan nilai tambah produk lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran HKI produk unggulan - Perlindungan indikasi geografis - Edukasi perlindungan inovasi 	Lintas Urusan



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta Pendanaan

Guna mendukung pencapaian misi Pemerintah Kota Samarinda yang telah ditetapkan, sekaligus merealisasikan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025-2029, maka disusunlah program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, serta target pendanaan. Tujuan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda adalah **Meningkatnya Peran Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi**. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis:

1. Memberdayakan dan Mengembangkan Koperasi;
2. Memberdayakan dan Mengembangkan UMKM;
3. Meningkatkan Pembangunan Industri.

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025-2029 tersaji sebagaimana Tabel dibawah ini.



Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
2.17.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda							
- Meningkatkan peran sektor unggulan daerah	Meningkatnya peran sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Memberdayakan dan mengembangkan Koperasi	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai AKIP	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB (%) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) Persentase Peningkatan Koperasi Sehat (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.17.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.17.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Jumlah Laporan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.17.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.17.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Laporan rencana kebutuhan barang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Laporan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Laporan Pemeliharaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
						Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas izin usaha simpan pinjam	Jumlah Koperasi Yang Diterbitkan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
					Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Jumlah koperasi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perkoperasian	Persentase Pengawasan dan Pemertasaan Koperasi (%)	2.17.03.2.01 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERTASAAN KOPERASI	
				Jumlah koperasi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perkoperasian	Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelenbagaan Koperasi (Unit Usaha)	2.17.03.2.01 - Pemertasaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Penguatan Tata	Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Penguatan Tata	2.17.03.2.01 - Pemertasaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
						2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Kelola Kelenbagaan Koperasi (Unit Usaha)		
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase Koperasi Aktif (%)	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
				Jumlah Koperasi yang telah dinilai kesehatan dan telah diberikan penghargaan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
			Meningkatnya kualitas SDM koperasi		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya produktifitas Koperasi		Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Jumlah SDM yang sadar berkoperasi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perindugan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perindugan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0004 - Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
		Memberdayakan dan			Persentase Peningkatan Usaha Mikro (%)		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
		mengembangkan UluKM					
			Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai AKIP	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.17.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.17.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.17.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Laporan rencana kebutuhan barang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Laporan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Laporan Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Palak dan Perzhinnanya (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri		Pertumbuhan Wirausaha (%)	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kermitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kermitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kermitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kermitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kermitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Usaha Mikro yang Terasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemantaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0009 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0012 - Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
			Meningkatnya Daya Saing UMKM		Proporsi UKM Menjaln Kemitraan dan Ekspor (%)	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Jumlah Usaha Mikro yang telah difasilitasi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Usaha Mikro yang Terasiliasi (Unit Usaha)	Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro 2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
		Meningkatnya Pembangunan Industri			Rasio Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)		
			Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai AKIP	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Perangkat Daerah (Nilai)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Unsur yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.17.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.17.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Jumlah Laporan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.17.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.17.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Laporan rencana kebutuhan barang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Laporan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Laporan Pemeliharaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen) - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan, Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Usaha Sektor Industri	Pelaku usaha industri yang diawasi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Usaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01 - Pemberitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)		

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					<p>-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)</p>	<p>3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota</p>	
					<p>Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)</p>	<p>3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)</p>	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Jumlah Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini (%)	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
					Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01.0001 - Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

Tabel 4. 2 Program Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2014	2015	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2016		2017		2018		2019		2020				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ENKOTA					18.531.365.036	14.263.247.056	16.155.564.000	20.522.839.000	16.762.460.700	16.762.460.700	17.097.709.900	21.564.633.900	17.097.709.900	21.985.288.100	17.439.664.100	
Meningkatnya pelaksanaan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (KMI) (indeks)	65,05	65,25	84,6	84,6	14.263.247.056	85,75	16.155.564.000	86	16.762.460.700	86,05	17.097.709.900	86,05	17.439.664.100	86,05	
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN DIN USAHA SIMPAN PINJAM	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	63,75	66	67	67		68	153.450.000	68	155.625.000	68	155.625.000	68	165.625.000	68	Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Meningkatnya kualitas jalin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	2	2,12	2,12	2,12	150.000.000	2,38	153.450.000	2,91	155.625.000	3,44	155.625.000	3,44	165.625.000	3,44	
2.17.03 - PROGRAM PENGAJAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						200.000.000		204.800.000		207.500.000		207.500.000		210.000.000		Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Penertarikan Koperasi (%)	17,79	19,91	19,91	19,91	200.000.000	20,08	204.800.000	20,08	207.500.000	20,06	207.500.000	20,06	210.000.000	20,06	
2.17.04 - PROGRAM PENJALAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						450.000.000		460.800.000		466.875.000		466.875.000		475.000.000		Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Meningkatnya kinerja pengawasan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	4,43	4,47	4,52	4,52	450.000.000	10,58	460.800.000	11,64	466.875.000	12,7	466.875.000	12,7	475.000.000	12,7	
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						920.540.000		940.000.000		966.441.000		966.441.000		975.000.000		Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
			2026					2027						2028				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
Meningkatnya kualitas SDM Koperasi	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pablihan (%)	19,32	19,84	19,84	820.540.000	19,84	945.000.000	20,11	965.441.000	20,37	956.441.000	20,37	975.000.000	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah				
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					597.578.000		610.325.000		620.883.000		620.883.000		635.000.000					
Meningkatnya produktifitas Koperasi	Persentase Meningkatkan Koperasi yang Berkualitas (%)	19	19,99	19,96	597.578.000	19,99	610.325.000	19,88	620.883.000	20,06	620.883.000	20,06	635.000.000	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah				
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					1.400.000.000		1.430.800.000		1.454.800.000		1.474.800.000		1.500.000.000					
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Pertumbuhan Wiraswasta (%)	10,29	20,45	5,27	1.400.000.000	5,27	1.430.800.000	5,27	1.454.800.000	5,27	1.474.800.000	5,27	1.500.000.000	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah				
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					560.000.000		562.500.000		570.625.000		585.000.000		585.000.000					
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Mengin Kemitrasan dan Export (%)	0,78	0,6	0,6	560.000.000	0,6	562.500.000	0,8	570.625.000	0,8	585.000.000	0,8	585.000.000	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah				
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					3.402.422.000		3.469.475.000		3.524.712.825		3.524.712.900		3.605.000.000					
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					2.402.422.000		2.450.575.000		2.482.512.825		2.482.512.900		2.540.000.000					
Meningkatnya Releasas Pembangunan Industri	Persentase Releasas Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	4,95	4,41	4,48	2.402.422.000	4,72	2.450.575.000	4,93	2.482.512.825	5,11	2.482.512.900	5,11	2.540.000.000	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Perindustrian				
3.31.03 - PROGRAM PENGEENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					400.000.000		400.000.000		410.000.000		410.000.000		415.000.000					
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Industri	Persentase Izin Usaha Industri	7,52	8,05	8,19	400.000.000	8,32	400.000.000	8,45	410.000.000	8,71	410.000.000	8,71	415.000.000	Dinas/Badan yang menanganai Bidang Perindustrian				



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			2025		2026		2027		2028		2029			2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Yang Dihasilkan (%)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatkan Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini (%)	0,18	2,64	2,9	600.000.000	600.000.000	612.800.000	612.800.000	622.200.000	622.200.000	622.200.000	622.200.000	650.000.000	Dinas/Badan yang menanggung Bidang Perindustrian	
TOTAL KESELURUHAN					21933787056,00	23966314000,00	2471972525,00	25989346800,00	25992089100,00						

Tabel 4. 3 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				14.263.247.056		16.155.594.000		16.792.480.700		17.097.709.900		17.439.664.100		
Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,05	85,5	14.263.247.056	85,75	16.155.594.000	86	16.792.480.700	86,05	17.097.709.900	86,05	17.439.664.100	2.17.3.31.3.28.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)				
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				250.000.000		300.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000				
NIS AK/P	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	250.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000		
	Jumlah Serta Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5		5			
2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	75.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000		
2.17.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01) Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(02) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
2.17.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000		
2.17.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
2.17.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Berdasarkan Bidang Usaha yang Diurus dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Usaha yang Diurus dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Usaha yang Diurus dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)			11.988.184.773		11.988.184.773		11.988.184.773		11.988.184.773		11.988.184.773		
Jumlah Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7	7	11.988.184.773	7	11.988.184.773	7	11.988.184.773	7	11.988.184.773	7	11.988.184.773		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	40	40		40		40		40		40			
	Jumlah Orang yang Menunggu Gaji dan	45	45		45		45		45		45			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan alat dan Tungkupan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tungkupan ASN (Orang/bulan)			10.689.938.557		10.689.938.557		10.689.938.557		10.689.938.557		10.689.938.557		10.689.938.557			
Terdapatnya Gaji dan Tungkupan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tungkupan ASN (Orang/bulan)	45	10.689.938.557	45	10.689.938.557	45	10.689.938.557	45	10.689.938.557	45	10.689.938.557	45	10.689.938.557	45	10.689.938.557		
2.17.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		1.218.246.216		1.218.246.216		1.218.246.216		1.218.246.216		1.218.246.216		1.218.246.216		1.218.246.216		
Terdapatnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	40	1.218.246.216	40	1.218.246.216	40	1.218.246.216	40	1.218.246.216	40	1.218.246.216	40	1.218.246.216	40	1.218.246.216		
2.17.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			50.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7	50.000.000	7	80.000.000	7	80.000.000	7	80.000.000	7	80.000.000	7	80.000.000	7	80.000.000		
2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	50.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		
2.17.01.2.06.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	50.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			277.207.973		696.480.400		696.480.400		696.480.400		696.480.400		696.480.400			
Jumlah Laporan	Jumlah Paket Perbaikan dan Peningkatan Kantor yang Disiapkan (Paket)	2	8	277.207.973	6	696.480.400	6	696.480.400	6	696.480.400	6	696.480.400	6	846.480.400		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diselesaikan (Paket)	2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Diselesaikan (Paket)	4	5		4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diselesaikan (Paket)	6	6		6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	20		37		39		39		41		41			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3	3		3		3		3		3		3			
2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi			14.759.000		14.759.000		14.759.000		14.759.000		14.759.000		14.759.000			
Uslub/Penerangan Bangunan Kantor																
Tersedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diselesaikan (Paket)	2	2	14.759.000	2	14.759.000	2	14.759.000	2	14.759.000	2	14.759.000	2	14.759.000		
2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor			90.907.500		290.907.500		290.907.500		290.907.500		290.907.500		290.907.500			
Tersedia Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Diselesaikan (Paket)	2	6	90.907.500	6	290.907.500	6	290.907.500	6	290.907.500	6	290.907.500	6	290.907.500		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)			
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	6	37.648.000	40.000.000	8	40.000.000	6	40.000.000	7	40.000.000	7	40.000.000		
2.17.01.2.08.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaian yang Disediakan (Paket)	4	5	30.813.900	30.813.900	4	30.813.900	4	30.813.900	4	30.813.900	4	30.813.900		
2.17.01.2.08.0006 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3	3	13.052.000	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000		
2.17.01.2.08.0009 - Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	20	90.027.573	300.000.000	37	300.000.000	39	300.000.000	39	300.000.000	41	450.000.000		
2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Mtk Daerah Penunjang Uhusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Jalanan yang Disediakan (Unit)	0	2	90.738.142	177.738.142	1	177.738.142	2	477.738.142	2	559.634.842	4	751.589.042		
2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Mobil yang Disediakan (Unit)	2	3	0	87.000.000	3	87.000.000	3	387.000.000	6	387.000.000	7	487.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	2	0	1	67.000.000	2	387.000.000	2	387.000.000	4	487.000.000				
2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				90.738.142		90.738.142		90.738.142		172.634.842		284.589.042				
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	3	90.738.142	3	90.738.142	3	90.738.142	6	172.634.842	7	284.589.042				
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.188.966.278		1.188.966.278		1.188.966.278		1.188.966.278		1.188.966.278				
Laporan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	82	82	1.188.966.278	82	1.188.966.278	82	1.188.966.278	82	1.188.966.278	82	1.188.966.278				
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				739.619.808		739.619.808		739.619.808		739.619.808		739.619.808				
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	82	82	739.619.808	82	739.619.808	82	739.619.808	82	739.619.808	82	739.619.808				
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				449.346.470		449.346.470		449.346.470		449.346.470		449.346.470				
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	5	449.346.470	5	449.346.470	5	449.346.470	5	449.346.470	5	449.346.470				
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Perumahan				448.149.890		1.704.194.407		2.011.081.107		2.214.443.807		2.214.443.807				
Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Perumahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	5	448.149.890	5	1.704.194.407	5	2.011.081.107	5	2.214.443.807	5	2.214.443.807				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
Ususan Pemerintahan Daerah																
Laporan Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan dibayarkan Pajak dan Perizinnya (Unit)	0	2	448.548.890	2	1.704.194.407	2	2.011.091.107	2	2.214.443.607	2	2.214.443.607				
	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Diperiksa (Unit)	2	2		2		2		2		2					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Diperiksa dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2		2		2		2		2					
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Diversifikasi (Unit)	3	3		3		3		3		3					
2.17.01.2.03.0001 - Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Diperiksa dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		200.000.000		
2.17.01.2.03.0002 - Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya (Unit)	0	2	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.161.890		150.000.000		150.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tertaksarannya Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2	100.161.890	2	150.000.000	2	150.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000		
2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				247.988.000		1.304.194.407		1.611.091.107		1.684.443.807		1.684.443.807		
Tertaksarannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)	3	3	247.988.000	3	1.304.194.407	3	1.611.091.107	3	1.684.443.807	3	1.684.443.807		
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				150.000.000		153.450.000		155.625.000		155.625.000		155.625.000		
Meningkatnya kualitas izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	2	2,12	150.000.000	2,38	153.450.000	2,91	155.625.000	3,44	155.625.000	3,44	155.625.000		2.17.3.31.3.28.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2.17.02.2.01 - Pemeliharaan Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	8	8	150.000.000	9	153.450.000	11	155.625.000	13	155.625.000	13	155.625.000		
Jumlah Koperasi Yang Didirikan Izin Usaha Simpan Pinjam														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
Wajibah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota																	
Jumlah koperasi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perkoperasian	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Pengalihan Tata Kelola Kabupaten/Kota Koperasi (Unit Usaha)	129	200.000.000	130	204.800.000	130	207.500.000	130	207.500.000	130	207.500.000	130	210.000.000				
Jumlah koperasi yang telah dilakukan Pemertasaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemertasaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	129		130		130		130		130		130					
2.17.03.2.01.0000 - Pengalihan Tata Kelola Kabupaten/Kota Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Pengalihan Tata Kelola Kabupaten/Kota Koperasi (Unit Usaha)	129	100.000.000	130	104.800.000	130	107.500.000	130	107.500.000	130	107.500.000	130	110.000.000				
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemertasaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																	
Pelaksanaan proses Pemertasaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemertasaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	129	100.000.000	130	100.000.000	130	100.000.000	130	100.000.000	130	100.000.000	130	100.000.000				
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSD/USP KOPERASI																	
Meningkatkan kinerja pengalihan koperasi	Persentase Koperasi AMU (%)	4,43	450.000.000	9,52	450.800.000	10,56	460.800.000	11,94	466.875.000	12,7	466.875.000	12,7	475.000.000	2.17.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
Jumlah Koperasi yang telah dinilai kesehatan dan telah diberikan penghargaan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Diberikan Penghargaan Kesehatan (Unit Usaha)	16	18	450.000.000	20	460.800.000	22	466.875.000	24	468.875.000	24	475.000.000					
2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kawenangan Kabupaten/Kota																	
Tertaskannya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kawenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	16	16	250.000.000	20	260.800.000	22	266.875.000	24	266.875.000	24	275.000.000					
2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Kesput Tala Kota, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Pemodal																	
Tertaskannya Penilaian Kesehatan Koperasi Tala Kota, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Pemodal	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	16	18	200.000.000	20	200.000.000	22	200.000.000	24	200.000.000	24	200.000.000					
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN																	
				920.540.000		946.000.000		956.441.000		956.441.000		975.000.000					

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatkan kualitas SDM koperasi	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pasahar (%)	19,32	19,84	920.540.000	19,84	945.000.000	20,14	956.441.000	20,37	956.441.000	20,37	975.000.000	2.17.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	
2.17.06.2.01 - Pendidikan dan Latihan Koperasi yang Berbasis Keunggulan dalam Daerah Kabupaten/Kota				920.540.000		945.000.000		956.441.000		956.441.000		975.000.000		
Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkeoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkeoperasian (Orang)	75	75	920.540.000	75	945.000.000	76	956.441.000	77	956.441.000	77	975.000.000		
2.17.05.2.01-0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				920.540.000		945.000.000		956.441.000		956.441.000		975.000.000		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkeoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkeoperasian (Orang)	75	75	920.540.000	75	945.000.000	76	956.441.000	77	956.441.000	77	975.000.000		
2.17.06 - PROGRAM PEMBUDAYAAN DAN PEHINDUANGAN KOPERASI				597.578.000		610.325.000		620.883.000		620.883.000		635.000.000	2.17.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	
Memangkanya produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berhasil (%)	19	19,96	597.578.000	19,96	610.325.000	19,96	620.883.000	20,06	620.883.000	20,06	635.000.000		
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Peningkatan Koperasi yang Keunggulannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				597.578.000		610.325.000		620.883.000		620.883.000		635.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Jumlah SDM yang sadar berkoperasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Berhasil Tambah, Menitki Akses Pasar, Akses Pembelian, Pengujian, Kembangkan, Perbaikan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	100	100	597.573.000	100	610.325.000	100	620.863.000	100	620.863.000	100	635.000.000				
2.17.06.2.01.0004 - Fasilitas Kemtraan Koperasi yang Keunggulannya Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	59	59	100.000.000	59	100.000.000	59	100.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000				
Fasilitas kemtraan antar koperasi maupun antara koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKK bagi Koperasi yang Keunggulannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Didasabai Kemtraannya (Unit Usaha)	50	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000				
2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembelian, Pengujian Kembangkan, Penilaian Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				300.000.000		410.325.000		420.863.000		420.863.000		435.000.000				
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembelian, Pengujian Kembangkan, Penilaian Manajemen, Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Berhasil Tambah, Menitki Akses Pasar, Akses Pembelian, Pengujian, Kembangkan	150	150	300.000.000	150	410.325.000	150	420.863.000	150	420.863.000	150	435.000.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
Standarasi, dan Restrukturisasi Usaha	Penilaian Manajemen, Standarasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)															
2.17.06.2.01.0009 - Pembudayaan Koperasi dengan Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota			197.579.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Peningkatan ilmu usaha Koperasi melalui aspek kelengkapan, produk, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	59	197.579.000	59	100.000.000	59	100.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000		100.000.000			
2.17.07 - PROGRAM PEMBUDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			1.400.000.000		1.430.600.000		1.454.600.000		1.474.600.000		1.500.000.000		1.500.000.000			
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Pertumbuhan Virusabta (%)	10,23	1.400.000.000	5,27	1.430.600.000	5,27	1.454.600.000	5,27	1.474.600.000	5,27	1.500.000.000		1.500.000.000			2.17.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2.17.07.2.01 - Pembudayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemiripan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			1.400.000.000		1.430.600.000		1.454.600.000		1.474.600.000		1.500.000.000		1.500.000.000			
Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina	Jumlah SMK yang Memenuhi Persyaratan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	100	1.400.000.000	100	1.430.600.000	100	1.454.600.000	100	1.474.600.000	100	1.500.000.000		1.500.000.000			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah SDK yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinergisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	300	300		300		300		300		300			
	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdaftar (Unit Usaha)	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Meksikasikan Kemampuan Usaha Mikro (Unit Usaha)	300	300		300		300		300		300			
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	300	300		300		300		300		300			
	Jumlah Usaha Mikro yang Tersertifikasi (Unit Usaha)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Usaha Mikro yang terdaftar (Unit Usaha)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	300	300		300		300		300		300			
2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemudahan Usaha Mikro				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Meksikasikan Kemampuan Usaha Mikro (Unit Usaha)	300	300	150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	300	300	250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terselenggaranya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	300	300	250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
2.17.07.2.01.0004 - Pembudayaan Kelembagaan Puteri dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Uji Usaha yang Telah Menerima Peminjaman dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Uhr: Usaha)			150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000			
2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinergisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pembudayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinergisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pembudayaan Usaha Mikro (Orang)			150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000			
2.17.07.2.01.0007 - Penelitian dan Pendampingan Penerapan Sistem Apikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
Terselenggaranya Usaha Mikro dalam Proses Penelitian dan Pendampingan Penerapan Sistem Apikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terselulas (Unit Usaha)		300	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
2.17.07.2.01.0009 - Fasilitasi Hak Kepayaan Intelektual Usaha Kecil				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01) Terterselusnya Hak Keayahan intelektual Usaha Mikro 2.17.07.2.01.0012 - Fasilitasi Pendaftaran Barang Jasa Perumahan	Jumlah Usaha Mikro yang tersertifikasi (Unit Usaha)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	(14)	(15)
2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Tersertifikasi (Unit Usaha)	50	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000		
Terterselusnya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik melalui terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pejalan jalan tol dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Mikro yang Tersertifikasi (Unit Usaha)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdaftar (Unit Usaha)	1.000	1.000	250.000.000	1.000	280.000.000	1.000	304.000.000	1.000	324.000.000	1.000	350.000.000	1.000	360.000.000		
2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SOM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendekatan dan Pestelahan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
Meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan (01)	Kewirausahaan (Orang)																
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			560.000.000		562.500.000		570.625.000		585.000.000		585.000.000		585.000.000				
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menghaji Kelembatan dan Ekspor (%)	0,78	0,8	560.000.000	0,8	562.500.000	0,8	570.625.000	0,8	585.000.000	0,8	585.000.000	0,8	585.000.000			2.17.3.21.3.29.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peninggalan Skala Usaha Menipid Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Peningkatan, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teclnolgg (Unit, Usahel)			550.000.000	100	562.500.000	100	570.625.000	100	585.000.000	100	585.000.000	100	585.000.000			
Jumlah Usaha Mikro yang telah dibetabai		40	100	550.000.000	100	562.500.000	100	570.625.000	100	585.000.000	100	585.000.000	100	585.000.000			
2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro			350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000				
Tertahabnya Usaha Mikro Menjadl Usaha Menengah Melalui Peninggalan, Kemahiran, Perluasan Pasar, Akses Pembiyaaan dan Investasi, Pengembangan SDM, danKegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Tertahabai (Unit Usahel)	200	200	350.000.000	200	350.000.000	200	350.000.000	200	350.000.000	200	350.000.000	200	350.000.000			
2.17.08.2.01.0006 - Produk dan Pengalabaan, Pemasaaran,			200.000.000		212.500.000		220.625.000		235.000.000		235.000.000		235.000.000				

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																
Terfasilitasinya Produksi dan Pengiriman, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produk dan Pengiriman, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	40	100	200.000.000	100	212.500.000	100	220.625.000	100	235.000.000	100	235.000.000				
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				3.402.422.000-		3.463.475.000		3.524.512.825		3.524.512.900		3.505.000.000				
3.31.02 - PROGRAM PEMBANGUNAN DAN INDUSTRI				2.402.422.000		2.450.675.000		2.482.512.825		2.482.512.900		2.540.000.000				
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	4,35	4,46	2.402.422.000	4,72	2.450.675.000	4,93	2.482.512.825	5,11	2.482.512.900	5,11	2.540.000.000				2.17.3.31.3.28.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sertifikasi, dan Pelaksanaan (Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen))			2.402.422.000		2.450.675.000		2.482.512.825		2.482.512.900		2.540.000.000				
Jumlah Dokumen Penyusunan, Penilaian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sertifikasi, dan Pelaksanaan (Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen))	1	1	2.402.422.000	1	2.450.675.000	1	2.482.512.825	1	2.482.512.900	1	2.540.000.000				
	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1					



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Peralayanan Industri (Dokumen)	1	1		1		1		0		0			
3.31.02.2.01.0002 -	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Peralayanan Industri			400.000.000		448.253.000		490.090.825		490.090.900		537.578.000		
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Peralayanan Industri	1	1	400.000.000	1	448.253.000	1	490.090.825	0	490.090.900	0	537.578.000		
3.31.02.2.01.0003 -	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Peralayanan Industri (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Peralayanan Industri (Dokumen)													



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1	1	550.000.000	1	550.000.000	1	550.000.000	1	550.000.000	1	550.000.000		
3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembudayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1.077.422.000		1.077.422.000		1.077.422.000		1.077.422.000		1.077.422.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembudayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembudayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	1	1.077.422.000	1	1.077.422.000	1	1.077.422.000	1	1.077.422.000	1	1.077.422.000		
3.31.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Pembudayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terselenggaranya Pelaksanaan Program Pengembangan Produktifitas (PPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produktifitas yang dapat diawasi - Jumlah program pengembangan jaminan produktifitas yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
3.31.03.2.01 - Perubahan Izin Usaha Industri (IUI), Industri (PIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perkusur Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Industri yang Diberikan (%)	7,82	8,19	400.000.000	8,32	400.000.000	8,45	410.000.000	8,71	410.000.000	8,71	415.000.000	2.17.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	
Meningkatkan Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Industri				400.000.000				410.000.000				415.000.000		
Perilaku usaha industri yang diawasi		1	1	400.000.000	1	400.000.000	1	410.000.000	1	410.000.000	1	415.000.000		

-Jumlah dokumen hasil
koordinasi dan
Sinkronisasi
Pergeseran terhadap
Perizinan Berusaha
induksi dengan skala
usaha Industri Kecil
dan Industri Menengah
yang berbasis di satu
Kab/Kota sepanjang
menusula
Dalam Negeri dan
Pernaman Modal
selain bidang usaha
berantu yang mengis
kewenangan
diemiliki pusat
(Dokumen)



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pembinaan/berzimas berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIMNAS yang terintegrasi dengan Sistem OSS PBA, bagi Pemanan Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha, bantu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penguasaan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000		210.000.000		210.000.000		215.000.000		
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Penguasaan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berbasis di satu Koa/koas sepanjang merupakan Pemanan Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha	~Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguasaan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berbasis di satu Koa/koas sepanjang merupakan Pemanan Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	1	215.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
3.31.03.2.01.0004 - Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan standar kegiatan usaha sektor penanaman modal dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor penanaman dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui Sistem yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	berbentuk yang mengacu kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)															
				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
		1	1	200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01) Kewenangan pemerintah pusat	(02) selain bidang usaha tertentu yang mengabdikan kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
3.31.04 - PROGRAM PENGELUARAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				600.000.000		612.800.000		622.200.000		622.200.000		622.200.000		650.000.000	
Manajemen Pembaruan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini (%)	0,16	2,9	600.000.000	3,17	612.800.000	3,43	622.200.000	3,7	622.200.000	3,7	622.200.000	3,7	650.000.000	2.17.3.31.3.28.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPRU Kewenangan Kabupaten/Kota				600.000.000		612.800.000		622.200.000		622.200.000		622.200.000		650.000.000	
Jumlah Informasi Industri	Jumlah Dokumen Hasil Disertifikasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Menurut Sektors (Dokumen)	1	1	600.000.000	1	612.800.000	1	622.200.000	1	622.200.000	1	622.200.000	1	650.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pergaulan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lainnya Kabupaten/Kota Mencakup Sistem Informasi Industri Nasional (SINIS) (Dokumen)		1		1		1		1		1		1	
3.31.04.201.0001 - Fasilitas Pengumpulan, Pergaulan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lainnya Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINIS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pergaulan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lainnya Kabupaten/Kota Mencakup Sistem Informasi Industri Nasional (SINIS) (Dokumen)			200.000.000		212.800.000		222.200.000		222.200.000		250.000.000		
Terdistribusinya Pengumpulan, Pergaulan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lainnya Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINIS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pergaulan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lainnya Kabupaten/Kota Mencakup Sistem Informasi Industri Nasional (SINIS) (Dokumen)	1	1	200.000.000	1	212.800.000	1	222.200.000	1	222.200.000	1	250.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SILIKS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SILIKS (Document)			300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000			
Terdinamasi dan Terpublikasinya Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SILIKS		1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000			
3.31.04.2.01.0003 - Peningkatan dan Evaluasi Keahlian Perusahaan Industri dan Industri Lingsur Kabupaten/Kota dalam Penyempaian Data ke SILIKS	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Evaluasi Keahlian Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingsur Kabupaten/Kota dalam Penyempaian Data ke SILIKS (Document)			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
Terdinamasi dan Divaluasinya Keahlian Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingsur Kabupaten/Kota dalam Penyempaian Data ke SILIKS		1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000			



4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian program unggulan pemerintah daerah, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menyusun berbagai program prioritas. Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk kegiatan dan subkegiatan yang terukur dengan *outcome* yang jelas, sehingga dapat menjadi dasar dalam evaluasi pencapaian pembangunan. Rincian program prioritas tersebut disajikan pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4. 4 Daftar Program Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.17.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda				
1.	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya kualitas izin usaha simpan pinjam	2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2.	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
			2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Pemodalan	
4.	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktifitas Koperasi	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.06.2.01.0004 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
			2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
5.	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	



NO	PROGRAM PRIORITYAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
			2.17.07.2.01.0009 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
			2.17.07.2.01.0012 - Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
			2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
			2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
6.	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Daya Saing UMKM	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
			2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro	
			2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
7.	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
			3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
			3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
8.	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Industri	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
9.	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain	



NO	PROGRAM PRIORITY	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
			3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
			3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menjabarkan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan pada hasil rumusan indikator pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda pada Renstra untuk periode pembangunan 2025-2029, jika disesuaikan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran seperti terlihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN							KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	2.17.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	
2.	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB	%	50,66	51,74	52,83	54,09	54,97	55,6	56,08		
3.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	6,83	6,83	6,83	6,84	6,85	6,86	6,86		
4.	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	%	3,97	3,97	4,17	4,37	4,57	4,77	4,77		
5.	Persentase Peningkatan Koperasi Sehat	%	3,96	4,23	4,49	4,76	5,02	5,29	5,29		
6.	Rasio Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	4,35	4,41	4,46	4,72	4,93	5,11	5,11		



4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam upaya mendukung tercapainya indikator kinerja utama secara lebih operasional dan terarah, diperlukan alat ukur yang lebih teknis dan spesifik pada tingkat pelaksanaan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat utama yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda. Penyusunan IKK bertujuan untuk memastikan kejelasan arah capaian, keterukuran kinerja, serta akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang berlangsung selama periode perencanaan tahun 2025-2029.

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	
1.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
2.	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	positif	%	0,78	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		
3.	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	positif	%	19	19,98	19,98	19,98	19,98	20,06	20,06	20,06	
4.	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	positif	%	17,79	19,91	19,91	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	
5.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	positif	%	2	2,12	2,12	2,38	2,91	3,44	3,44		
6.	Pertumbuhan Wirausaha	positif	%	10,23	20,45	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27		



NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.	Persentase Koperasi Aktif	positif	%	4,43	8,47	9,52	10,58	11,64	12,7	12,7	
8.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	positif	%	19,32	19,84	19,84	19,84	20,11	20,37	20,37	
9.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
10.	Persentase Izin Usaha Industri yang Diberikan	positif	%	7,52	8,05	8,19	8,32	8,45	8,71	8,71	
11.	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	positif	%	4,35	4,41	4,46	4,72	4,93	5,11	5,11	
12.	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	positif	%	0,16	2,64	2,9	3,17	3,43	3,7	3,7	



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sinergis dengan dokumen RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode 2025 sampai dengan 2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

Dokumen Renstra selanjutnya akan dijabarkan lagi ke dalam perencanaan jangka pendek atau tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk tahun 2025 hingga tahun 2029 dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Samarinda. Dengan demikian penjabaran Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke dalam Renja Perangkat Daerah atau dokumen perencanaan lain dapat bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan RKPD Pemerintah Kota Samarinda yang ditetapkan.

Dalam mewujudkan dan mencapai target dan indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk kurun waktu lima tahun kedepan memang tidak mudah dan akan banyak ditemui tantangan serta kendala baik dari dalam penyelenggara pemerintahan maupun dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari pihak terkait terutama para pemangku kebijakan agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang koperasi, UKM dan perindustrian dapat tercapai dengan mengacu pada ketetapan RPJMD.

Dengan demikian hasil-hasil dari perencanaan kegiatan pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat.



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA**

Jl. Ir. H. Juanda No.81, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur